

KRITIK TERHADAP PRAKTIK KOLONIALISME DI JAWA PADA BUKU “HABIS GELAP TERBITLAH TERANG”

Laillia Dhiah Indriani*¹ Ika Rizki Yustisia²

¹Program Studi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
Jl. Teknik Utara, Pogung Kidul, Sinduardi, Kec.Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta (55384), (0274) 555881

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65113

Surel: *lailliadhiahindriani@mail.ugm.ac.id ²Yustisia.ika@ub.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berusaha membongkar kritik Kartini terhadap kebijakan kolonialisme yang merugikan masyarakat Jawa, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan gender dan relasi kuasa pemerintah kolonial. Kolonialisme yang terjadi bertahun-tahun telah meninggalkan berbagai warisan yang sampai saat ini masih diadopsi. Salah satu sumbangsih pemerintah kolonial adalah kebijakan-kebijakan yang mendiskreditkan perempuan dan memperkuat budaya patriarki. Hal ini secara tidak langsung telah membatasi ruang gerak perempuan. Baik dari segi pendidikan, relasi sosial, hingga akses ke ruang publik. Budaya patriarki sendiri sering diasosiasikan dekat dengan masyarakat Jawa. Salah satu cara untuk mendobrak budaya patriarki adalah dengan cara mengetahui akar permasalahan dari mana lahirnya budaya tersebut. Surat-surat Kartini yang dibukukan dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang” secara garis besar memberi gambaran bagaimana kebijakan kolonialisme mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sebagai metode analisis data, penelitian ini akan menggunakan Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak agar bisa membongkar wacana tidak hanya dari aspek tekstual, melainkan juga sosio historis yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah wacana. Hasil penelitian menunjukkan adanya intervensi pemerintah kolonial Hindia-Belanda terhadap kebijakan-kebijakan seperti poligami, politik etis dan eksklusifitas pendidikan bagi perempuan, serta efek dominasi budaya barat yang melunturkan nilai-nilai lokal. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa akar dari budaya patriarki tidak hanya bersumber dari adat istiadat masyarakat Jawa, melainkan juga warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada masa penjajahan.

Kata kunci: Kartini, Kolonialisme, Surat, Hindia-Belanda

Abstract

This paper seeks to unpack Kartini's critique of colonial policies that harmed Javanese society, particularly in relation to gender inequality and the power relations of the colonial government. Years of colonialism have left various legacies that are still being adopted today. One of the contributions of the colonial government were policies that discredited women and strengthened patriarchal culture. This has indirectly limited women's space for movement. Both in terms of education, social relations, and access to public spaces. Patriarchal culture itself is often associated with Javanese society. One way to break the patriarchal culture is by knowing the root causes of the culture. Kartini's letters, which were recorded in "Habis Gelap Terbitlah Terang" outline how colonialism policies affected the prevailing customs in society. As a method of data analysis, this research will use Ruth Wodak's Critical Discourse Analysis in order to dismantle the discourse not only from the textual aspect but also from the socio-historical background of the formation of a discourse. The results show the intervention of the Dutch East Indies colonial government in policies such as polygamy, ethical politics, and exclusivity of education for women, as well as the effects of western cultural dominance that undermined local values. From this research, it can be seen that the roots of patriarchal culture do not only stem from the customs of Javanese society but also from the legacy of the Dutch East Indies colonial government during the colonial period.

Keywords: Kartini, Colonialism, Letters, Dutch East Indies

A. PENDAHULUAN

Masa kelam kolonialisme yang berlangsung bertahun-tahun melahirkan doktrin sendiri di benak rakyat Indonesia dari berbagai kalangan. Kedatangan bangsa kolonial membentuk kembali struktur yang sudah ada. Tidak ada cabang pengetahuan yang tidak disentuh oleh pihak kolonial (Loomba, 2000). Sebagai negeri jajahan yang dipaksa tunduk kepada nilai-nilai dari negeri penjajah, membuat bangsa Indonesia mau tidak mau mengadopsi berbagai pemikiran dan adat istiadat yang dibawa oleh negeri penjajah. Penguasaan kolonialisme juga berakibat pada lemahnya kekuasaan raja-raja atau bangsawan, bahkan mereka berada dibawah pengawasan pejabat-pejabat asing (Harkantiningih, 2014). Hal ini juga terjadi pada penguasa-penguasa Jawa.

Pemerintah kolonial menjalankan berbagai kebijakan selama memerintah Hindia-Belanda, termasuk di Jawa. Beberapa kebijakan ini berpengaruh besar terhadap pemerintahan penguasa Jawa. Kebijakan ini mengakar sangat kuat di benak masyarakat, bahkan hingga masa kolonialisme berakhir (Bahardur, 2017). Salah satunya adalah kebijakan seperti poligami dan sistem Nyai, kebijakan pendidikan bagi perempuan, serta dominasi lain dari segi bahasa dan adat istiadat. Kebijakan-kebijakan ini secara tidak langsung telah memperkuat budaya patriarki di Jawa yang mendiskreditkan perempuan.

Budaya patriarki merupakan budaya yang sering dianggap dekat dengan Jawa. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lalu, harus tunduk pada sistem patriarki yang begitu mengikat. Beberapa penderitaan perempuan buah dari tradisi patriarki adalah praktik poligami dan sistem gundik, eksklusifitas pendidikan bagi perempuan, akses publik yang anti perempuan, serta konstruksi feminitas yang dianggap sebagai ciri khas perempuan normal. Budaya patriarki juga erat kaitannya dengan hegemoni laki-laki sebagai makhluk superioritas membuatnya menganggap perempuan sebagai subordinat dari kaum laki-laki (Abbas, 2012).

Salah satu cara menghentikan praktik budaya patriarki yang sudah berjalan seperti kewajaran adalah dengan mengetahui akar permasalahannya. Naskah-naskah kuno, literatur, karya sastra, dan tulisan-tulisan lain yang ditulis pada masa kolonial bisa membantu untuk menjawab permasalahan ini. Hal ini dilakukan Edward Said membongkar cara barat memandang timur dalam bukunya "*Orientalism*". Said membaca sejarah kolonial dengan cara meneliti literatur yang diproduksi pada masa kolonial. Literatur-literatur yang ada pada masa kolonial tidak hanya mencerminkan ideologi dominan, melainkan mengodekan berbagai ketegangan, kompleksitas, budaya, dan nuansa yang ada dalam budaya kolonial. Literatur yang ditulis oleh penjajah maupun terjajah, pada dasarnya saling menyerap, mengambil serta menulis budaya-budaya lain, serta menciptakan identitas-identitas baru. Sehingga literature juga berperan penting dalam mengambil, mengembalikan, dan menentang sarana-sarana yang kaya akan dominasi dan ideologi kolonial (Loomba, 2000).

Dalam meneliti literatur masa kolonial, tulisan-tulisan Kartini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Kartini memulai perjuangannya lewat korespondensi dengan E.H. Zeehandelaar kemudian berlanjut ke beberapa belanda yang punya nama pada saat itu. Nama-nama seperti Abendanon, Van Kol, Ovink Soer dan G.K. Anton muncul dalam daftar nama korespondensi Kartini. Tidak hanya menulis tentang pemikiran emansipasinya, Kartini membagi banyak hal melalui surat-suratnya. Salah satu topik yang sering dibicarakan oleh Kartini adalah tentang kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan tersebut telah mengubah

rakyat Bumiputera menjadi produk-produk hasil polesan Belanda. Mereka meresapi, mengamalkan, dan membenarkan segala praktik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Hal ini melunturkan nilai-nilai lokal yang sudah ada sebelumnya dan digantikan oleh nilai-nilai yang dibawa pihak kolonial. Penelitian sebelumnya membahas Kartini dan buku “*Habis Gelap Terbitlah Terang*” dari sudut pandang pendidikan ala Kartini, emansipasi Kartini, serta representasi perempuan Jawa melalui Kartini.

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Mustikawati, 2015) yang berjudul “Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita dalam Pandangan RA. Kartini pada Buku ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’)”. Dalam penelitian ini, dibahas secara khusus emansipasi Kartini ketika Kartini masih dalam tahap belum mengenal Islam. Jadi hasil dari penelitian ini hanya menyoroti sudut pandang kebebasan perempuan dalam mengenyam pendidikan serta menolak menikah. Penelitian serupa karya (Kusumawati, 2013) yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Kumpulan Surat RA. Kartini ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ Terjemahan Armijn Pane”. Pada penelitian ini hanya dibahas pemikiran RA. Kartini secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk pendeskripsian pesan dan makna yang terkandung dalam kumpulan surat R.A. Kartini “*Habis Gelap Terbitlah Terang*”, serta pendeskripsian kemungkinan implementasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia untuk peserta didik di sekolah.

Sedangkan penelitian ini berusaha membongkar kritik Kartini terhadap kebijakan kolonialisme yang dinilai merugikan masyarakat Jawa. Titik berat penelitian ini adalah berfokus pada kebijakan yang mengakibatkan ketimpangan gender dan perubahan sosial di Jawa. Sebagai metode analisis data, penelitian ini akan menggunakan Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak. Dengan metode ini, peneliti bisa membongkar sebuah wacana secara lebih detail. Tidak hanya dari aspek tekstual, melainkan juga sosio historis yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah wacana.

B. KAJIAN TEORI

Kolonialisme merupakan proses penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta benda rakyat dari suatu tempat yang berbeda (Ania Loomba, 2000). Jadi, kolonialisme dapat diartikan sebagai suatu paham pembentukan koloni di luar batas teritorial yang sah dengan tidak mempedulikan wilayah yang dituju sudah berpenghuni atau belum. Kolonialisme juga disebut sebagai suatu paham pendelegasian kekuatan politik ke luar wilayah yang sah untuk memberdayakan dan menguasai wilayah lain (Miftakhudin, 2019: 7). Bentuk dari kolonialisme sendiri identik dengan praktik penjajahan dan eksploitasi sumber daya suatu daerah, baik alam maupun manusia. Kolonialisme yang dilakukan bangsa Eropa ke Indonesia, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebutaan masyarakat pribumi akan pengetahuan, menjadikan Indonesia sebagai lahan eksploitasi bangsa Eropa selama bertahun-tahun (Aman, 2014: v). Sejarah mencatat bahwa awal mula kolonialisme terjadi ialah untuk mencari hasil tani yang tidak ada di wilayahnya sendiri dan mengharuskan mereka mendirikan koloni di wilayah lain (Miftakhudin, 2019: 8). Indonesia yang merupakan wilayah dengan tanah yang subur serta menghasilkan beragam jenis produk pertanian, menjadi sasaran bangsa kolonial untuk menjalankan misinya.

Luasnya wilayah Indonesia memungkinkan pihak kolonial menerapkan strategi eksploitasi yang berbeda antar wilayah. Jawa merupakan wilayah yang dirasa merasakan dampak paling berat dari kolonialisme tersebut. Sebuah alasan yang mendasari

eksploitasi lebih gencar dilakukan di Jawa karena Jawa adalah wilayah yang paling padat penduduknya, dan sistem politiknya relatif lebih mapan dibandingkan daerah lain (Aman, 2014: 75). Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda hingga awal abad ke-19 ialah tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Ciri pokok sistem tanam paksa terletak pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman pertanian mereka dan bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak (Kurniawan H. 2014).

Fokus utama tanam paksa ialah peningkatan hasil produksi tanaman ekspor yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran Eropa, seperti kopi, teh, tembakau. Dampak dari tanam paksa sendiri sangat merugikan pihak pribumi. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan awal tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor, sehingga tidak dapat mengerjakan sawahnya dengan baik, bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakan sawahnya sama sekali (Hermawati, 2013). Kerugian besar masyarakat akibat tanam paksa ini mengharuskan pemerintah kolonial Hindia Belanda berbenah diri. Sehingga, pada akhir abad ke-19 lahirlah yang disebut dengan politik etis.

Politik etis mulai dilaksanakan tahun 1901, yaitu pada akhir abad ke-19. Intisari politik etis terletak pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Tujuan dari politik etis tersebut ialah untuk menumbuhkan kesadaran diri dan perasaan individualisme pada *elit* baru Indonesia yang berpendidikan Barat dengan maksud menggusur nilai-nilai yang telah dimiliki oleh Indonesia dan menggantikannya dengan nilai yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda (Susilo, 2018). Kebijakan politik etis di Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh merosotnya kondisi sosial-ekonomi kaum bumiputra akibat kegagalan liberalisme serta perubahan peta politik di Belanda (Fachrurozi, 2019). Semangat politik etis ini membuat banyak perubahan terhadap rakyat Hindia Belanda. Perubahan paling besar terjadi pada kaum Bumiputra. Pendidikan menjadi program sentral dalam politik etis. Mulai dilegalkannya pendidikan bagi sebagian kaum Bumiputera, merupakan salah satu bentuk dari praktik politik etis. Tujuan lain dari dibukanya sekolah untuk sebagian masyarakat Bumiputera ialah untuk mempersiapkan generasi baru yang nantinya akan bekerja untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda (Yulianti, 2018).

Masa kolonial yang terjadi bertahun-tahun dengan berbagai macam kebijakan ini telah menghasilkan doktrin baru di tengah masyarakat Indonesia. P.J Marshal (dalam Kehoe, 2008) menjelaskan bahwa elemen kolonialisme tetap ada pada negara terjajah meskipun proses imperialisme telah berakhir. Jadi, nilai-nilai yang kini dianut oleh bangsa Indonesia tidak sepenuhnya murni. Beberapa di antaranya mengadopsi nilai-nilai pemerintah kolonial yang pernah menguasai Indonesia selama bertahun-tahun.

Semua praktik kolonialisme pasti menghadirkan dua hirarki sosial, yakni penjajah dan yang terjajah. Kaum terjajah sering dikaitkan dengan istilah subaltern. Subaltern pertama kali dikenalkan oleh Antonio Gramsci yang digunakan untuk mengkaji sekelompok marginal dari kelas rendah. Kajian tentang subaltern sendiri kemudian dikembangkan oleh Gayatri Spivak melalui tulisannya "*Can the Subaltern Speak?*". Gramsci menegaskan bahwa adanya subaltern ini salah satunya disebabkan oleh hegemoni dalam masyarakat dan penindasan oleh kaum elit. Kaum subaltern ini semakin tertindas karena tidak memiliki akses yang memadai sebagaimana dimiliki oleh kaum elit (Spivak, 1988). Lebih lanjut, Spivak (1988) juga menegaskan bahwa kolonialisme

meninggalkan jejak-jejak sejarah yang tidak bisa begitu saja dihilangkan. Jejak-jejak ini meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini yang kemudian membuat kaum subaltern masih ada bahkan hingga kolonialisme itu sendiri sudah berakhir.

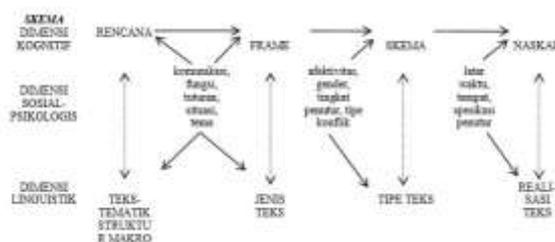
McClintock, (1995) menjelaskan bahwa salah satu ciri dominasi pemerintah kolonial terhadap negara jajahannya adalah mengubah sisi domestik yang telah mengakar dalam kelas sosial masyarakat jajahan, dan digantikan oleh identitas domestik kolonial. Dalam kasus ini, peran gender sering dikonstruksikan. Perempuan-perempuan asal negara jajahan benar-benar dikontrol oleh pihak kolonial. Mereka tidak mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan orang-orang asal negara penjajah (Kartika, 2011).

Penguasaan ini juga terjadi di Jawa pada masa kolonial. Perempuan pribumi tidak mendapatkan akses untuk pendidikan maupun ranah sosial. Mereka didesain untuk sesegera mungkin menikah dan memiliki keturunan. Mereka juga tidak diberikan akses untuk mengenyam pendidikan. Hal ini tentu membuat keterbelakangan pemikiran kaum perempuan Jawa. Hal ini tidak hanya berlaku pada kaum pribumi, namun juga berlaku bagi perempuan dari bangsawan Jawa. Mereka memang bernasib lebih baik karena berkesempatan mengenyam pendidikan. Tapi, itu hanya berlaku pada masa kanak-kanak, atau sebelum mereka mengalami menstruasi. Setelah mereka menstruasi, mereka akan dipingit sampai ada orang baik yang datang untuk melamar. Para perempuan ini juga tidak punya kuasa untuk melawan. Semua geraknya dibatasi oleh hirarki kekuasaan kolonial dan kebijakan yang dinilai baik oleh kaum bangsawan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong, (2012: 6) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang dialami oleh subjek penelitian terkait bagaimana motivasi, perilaku, tindakan, persepsi, dan sebagainya. Penelitian kualitatif bekerja dalam konteks historis yang kompleks sehingga memungkinkan terciptanya pengertian yang berbeda-beda di setiap momen. Dalam penelitian kualitatif, realitas memiliki dimensi interaktif, jamak, dan menimbulkan terciptanya pertukaran pengalaman untuk diinterpretasikan satu sama lain (Denzin dan Lincoln, dalam Puji Leksono, 2015: 36). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara dokumentasi dan studi literatur. Objek pada penelitian ini berupa surat-surat Kartini yang diterbitkan pada buku berjudul “*Habis Gelap Terbitlah Terang*”.

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak atau yang dikenal juga dengan *Discourse Historical Approach*. Dalam pandangan Ruth Wodak, analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok digambarkan (Darma, 2014: 161). Ruth Wodak memandang bahwa sebuah wacana yang terjadi tak pernah lepas dari aspek historis yang melatarbelakangi wacana. Adapun pada tahap analisis data, model Wodak membagi melalui tiga tahap yaitu (Wodak & Meyer, 2001). Untuk mempermudah proses analisis data pada metode DHA, berikut merupakan model yang ditawarkan oleh Wodak:



Bagan 1. Model Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak

Sumber: (Hwia, 2008)

Dari model di atas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan analisisnya, Wodak tidak hanya mengedepankan dimensi kognitif dan dimensi linguistik dari sebuah teks, melainkan juga melibatkan pemikiran dan kondisi sosialpsikologis dari penulis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda telah mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di nusantara. Kehadiran pihak kolonial yang mendukung kemunculan budaya baru ini tidak hanya menunjukkan adanya keberadaan orang-orang asing di Bumiputera, melainkan juga sebagai penanda bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah berkuasa pada masa itu (Hartiningih, 2014). Kartini adalah salah satu yang merasakan adanya kolonialisme di Bumiputera. Beberapa pemikiran Kartini secara tidak langsung merupakan kritik terhadap kuasa Belanda di Bumiputera. Beberapa kritik Kartini terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah sebagai berikut.

A. Kritik Poligami dan Praktik Gundik/Nyai

Salah satu inti dari surat-surat Kartini adalah kritik tajamnya tentang praktek poligami yang diajarkan oleh bangsawan Jawa pada masa itu. Kartini sendiri merupakan produk dari praktik poligami tersebut. Kritik poligami yang dilayangkan oleh Kartini ini tidak semata-mata untuk kaum Bumiputera saja, melainkan juga memiliki keterkaitan dengan praktik sosial dan kebijakan kolonial Hindia-Belanda yang mewajibkan laki-laki Belanda mengadopsi perempuan muda asal Bumiputera untuk dijadikan pembantu rumah tangga. Apabila beruntung, mereka akan naik tahta menjadi pembantu rumah tangga disebut dengan Nyai. Seorang Nyai akan mendapatkan berbagai keistimewaan dari keluarga yang ia layani, salah satunya ialah berhak mendapatkan penghasilan lebih dan tambahan pakaian yang lebih layak (Miftakhudin, 2019: 174). Posisi Nyai yang sering kali tidak memiliki status pernikahan sah tersebut hanya dijadikan objek pemuas seksualitas laki-laki Belanda. Dalam pengertian lain, Nyai juga sering disebut juga dengan Gundik.

Konsep Gundik ini diterapkan pula oleh Belanda kepada masyarakat Bumiputera dengan mewajibkan seorang laki-laki bangsawan memiliki istri dari kalangan bangsawan (garwa padmi) untuk memertahankan keningratannya dan bebas memiliki istri lain dari kalangan non-bangsawan sebagai garwa ampil (Noviyanti, 2010). Kedua hal tersebut membuat perempuan menjadi subordinat yang hanya dijadikan pemuas atau korban dari sebuah sistem. Alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut ialah untuk menjaga kehormatan dan keningratan sebagai bangsawan (Said, 2014). Jika berkenan, seorang bupati dapat memiliki istri lebih dari satu, jikalau istri pertamanya bukan berasal dari kalangan bangsawan. Namun, posisi istri pertama yang dianggap sah oleh pemerintah kolonial dan yang berhak mendampingi bupati pada acara kedinasan tetaplah istri dari kalangan bangsawan. Penyebutan istri utama dari kalangan bangsawan ialah garwa padmi dan bergelar Raden Ayu. Sedangkan untuk istri-istri lain di luar istri pertama bernama garwa ampil dan berstatus Mas Ajeng.

Kritik Kartini terhadap sistem poligami dan Gundik ini dituangkan dalam beberapa surat sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Surat Karini Perihal kritik poligami

Tanggal	Kepada	Isi surat
Agustus 1901	Ny. N. Van Kol	Pada surat ini, Kartini mengkritik perihal ketidakberdayaan perempuan menghadapi pernikahan dalam masyarakat Jawa
23 Agustus 1900	Stella	Kritik terhadap hukum Islam yang dinilai melanggar praktik poligami
Agustus 1900	Ny. Abendanon Mandri	Sikap diri dan penolakan keras terhadap poligami
6 November 1899	Stella	Kritik terhadap definisi Cinta dan praktik poligami
25 Mei 1899	Stella	Mengutuk pernikahan yang dinilai hanya menguntungkan pihak laki-laki

Sumber: diolah oleh penulis

Surat pertama yang membahas tentang gundik ialah surat yang ditujukan kepada Ny. N. Van Kol pada Agustus 1901

“... banyak perempuan Jawa yang harus menikah dengan perjanjian yang menghina dan merendahkan dirinya sendiri. Di bawah perintah ayah, paman atau kakaknya, anak perempuan harus bersedia mengikuti seorang laki-laki yang sama sekali asing baginya, bahkan tidak jarang sudah beranak istri. Seorang perempuan harus patuh tanpa didengar pendapatnya. Seorang perempuan tidak perlu hadir bahkan tidak dibutuhkan ‘persetujuannya’ ketika dinikahkan... perempuan sudah terbiasa dan menganggap hal itu tidak apa apa, kata orang yang tau segala-galanya itu. jika mereka tidak setuju dengan semua itu, mengapa mereka pasrah dan menerima apa yang menimpa dirinya”

Pada surat ini, Kartini mengungkapkan bahwa perempuan tidak punya kuasa akan tubuhnya sendiri. Sistem poligami dan gundik memaksa perempuan untuk mau dinikahkan tanpa persetujuan. Praktik semacam ini dianggap sebagai hal biasa oleh masyarakat. Rasa sakit dan suara mereka sama sekali tidak didengar. Sama seperti pemerintah Kolonial, sistem gundik ini juga diterapkan oleh bangsawan Jawa. Kritik ini dilakukan Kartini juga berdasarkan atas pengalaman pribadinya. Ngasirah, Ibu biologis Kartini tidak bisa menempati status sebagai Garwa Padmi atau Raden Ayu karena bukan berasal dari kalangan bangsawan. Ngasirah hanya dianggap sebagai Garwa Ampil atau dalam bahasa sekarang disebut *second sex*. Oleh karena itu, Bupati Jepara berhak menikah lagi dengan seorang bangsawan agar bisa mempertahankan status kebangsawanannya.

Praktik poligami yang dilakukan oleh bangsawan Jawa pada masa itu, dinilai oleh Kartini juga sebagai salah satu dalih yang mengatasnamakan agama. Islam yang menjadi agama mayoritas pada saat itu, memiliki ketentuan bahwa laki-laki diperbolehkan

memiliki istri lebih dari satu. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh Kartini pada surat tanggal 23 Agustus 1900 kepada Stella:

“...Dan jika suatu hari atau besok, suami tercinta dapat saja membawa pulang perempuan untuk jadi temannya, yang mempunyai hak yang sama atas suaminya. Menurut hukum Islam perempuan itu istri yang sah juga. ... bolehkah keadaan ini berlangsung terus Stella? Mereka sudah biasa sekali dengan keadaan seperti itu, sehingga mereka tidak melihatnya lagi sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak menderita karenanya. Hampir setiap perempuan yang saya kenal di sini mengutuk hak laki- laki. Tapi kutukan itu tidak ada gunanya. Harusnya kami perbuat...”

Dalam penggalan surat tersebut, Kartini juga sekaligus menegaskan adanya kesadaran palsu yang melanda perempuan Jawa. Perempuan Jawa telah menganggap bahwa poligami adalah hal biasa, padahal sejatinya mereka telah terhegemoni dengan narasi dominan sehingga penderitaan mereka diabaikan. Narasi dominan perihal poligami ini kian memburuk melalui praktik pergundikan yang marak terjadi di kalangan orang-orang Belanda yang datang ke Bumiputera.

Kesadaran palsu yang dialami oleh perempuan Jawa dalam melihat poligami ini kemudian mengusik diri Kartini. Ia mengambil sikap tegas berupa penolakan terhadap poligami sebagaimana dimuat dalam surat kepada Ny. Abendanon pada Agustus 1900:

“...Aduh mungkin saja suatu waktu, nasib membebankan kepada saya apa itu siksaan poligami. “saya tidak mau!” mulut menjerit dengan kerasnya, dan hati menjera jeritan itu ribuan kali... tapi aduh.. saya ingin... tapi apakah manusia mempunyai keinginan...?Ya. Harus. Kami harus memiliki keinginan sejak dari teriakan hidup kami yang pertama sampai helaan nafas kami yang terakhir...”

Sikap tegas perihal poligami ini kemudian membawanya pada pandangan kritis ketika melihat pernikahan. Perihal pernikahan, Kartini juga melayangkan kritiknya pada surat tanggal 6 November 1899 kepada Stella:

“...Di dunia Jawa, cinta merupakan khayalan. Bagaimana seorang laki-laki dan seorang wanita dapat saling mencintai, jika pertemuan pertama kalinya terjadi ketika mereka saling terikat oleh pernikahan secara sungguh-sungguh”

Kartini menyebut tentang definisi dari cinta dalam pernikahan. Ia menafsirkan bahwa seseorang yang menikah atas dasar paksaan dan perjodohan, tidak akan merasakan cinta yang sejati. Padahal, untuk menjalani sebuah pernikahan, cinta memegang peran penting. Jika dalam pernikahan tidak memiliki cinta didalamnya, maka hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga dan poligami menjadi hal yang wajar terjadi.

Pada suratnya yang lain, Kartini juga menuliskan bahwa poligami tidak semata-mata untuk mempertahankan status kebangsawanan, melainkan juga dijadikan objek pemuas seksual. Pada surat yang ditujukan kepada E.H Zeehandelaar atau Stella pada 6 November 1899 Kartini menulis:

“...bagaimana saya dapat menghormati seseorang yang sudah menikah dan sudah menjadi bapak, yang apabila sudah bosan dengan istri lamanya akan membawa wanita lain kedalam rumahnya dan mengawininya secara sah...”

Surat ini sekaligus menegaskan bahwa pada masa itu, perempuan sudah dijadikan sebagai objek untuk dinikmati seksualitasnya. Kebijakan poligami yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial dan diadopsi oleh penguasa Jawa ini menjadi gambaran kenapa

poligami masih menjadi isu populer hingga saat ini. Warisan kolonial yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang superior, telah membawa perempuan sebagai manusia kelas kedua. Bahkan hingga saat ini, praktik poligami masih digadang-gadangkan sebagai bentuk peradaban, padahal dalam misi pemberadaban itu, terbesit penderitaan dan suara perempuan yang terbungkam.

Jadi bisa disimpulkan bahwa praktik poligami yang menjadi salah satu konsern Kartini ini bukan hanya semata-mata berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa dalam menafsirkan ayat Al-Quran saja, melainkan ada relasi kuasa yang membuat kebijakan dan mendukung praktik poligami. Perlu dicurigai pula bahwa adanya kebijakan ini berhubungan dengan praktik Gundik. Bisa jadi bahwa kebijakan ini dibuat untuk melancarkan sistem Gundik tersebut, agar pihak kolonial leluasa dalam memilih gundik dari kalangan pribumi untuk dijadikan sebagai objek pemuas seksual.

Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Spivak (1988) mengenai subaltern. Subaltern ini terdiri dari kaum perempuan tertindas oleh kebijakan yang dibawa oleh pihak Kolonial, dan diadopsi oleh penguasa Jawa. Selain itu, konsep ini juga diperjelas oleh Spivak bahwa adanya subaltern juga mengarah pada pembatasan ruang akses. Merka yang tertindas tidak bisa didengar suaranya karena tidak memiliki akses untuk menyuarakan penderitaannya (Setiawan, 2018). Akhirnya, penindasan terus berlanjut tanpa mempedulikan suara yang tertindas. Salah satu bentuk penindasan yang dilakukan oleh kaum kolonial terhadap Indonesia adalah sistem Gundik yang menempatkan perempuan hanya sebagai objek pemuas seksual.

B. Kritik Terhadap Dominasi Bahasa Belanda

Kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda selanjutnya ialah politik etis yang dilakukan pada tahun 1901. Pada pelaksanaan politik etis pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi dan perlindungan industri pribumi (Kurniawan B. 2013). Pelaksanaan politik etis sendiri sebenarnya dilakukan untuk menunjukkan bahwa Belanda mampu menciptakan Bumiputra yang berkualitas dan lebih baik dari pada masa penjajahan Inggris. Selain itu, politik etis dilakukan sebagai penebusan dari kerusakan akibat tanam paksa. Pada konteks pendidikan, pemerintah kolonial Hindia-Belanda menegaskan beberapa aspek untuk menunjukkan dominasinya. Beberapa kebijakan pendidikan yang sarat akan dominasi pihak Kolonial sebagai antara lain sebagai berikut: pertama, Pendidikan dan pengetahuan barat harus diterapkan sebanyak mungkin di kalangan penduduk Bumiputera. Kedua, Bahasa Belanda harus digunakan sebagai Bahasa utama dan pengantar di sekolah-sekolah. Ketiga, Pendidikan rendah bagi kalangan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Rifa'i, 2011).

Pada ranah pendidikan, pemerintah Hindia-Belanda juga menerapkan pola diskriminasi dan menghalangi pertumbuhan penduduk lokal sudah ada (Syahrudin & Susanto, 2019). Beberapa diskriminasi yang dilakukan adalah dengan membedakan produk pendidikan bagi anak-anak Belanda dan kaum Bumiputra, serta kontrol yang kuat dari pihak kolonial terhadap pendidikan bagi Bumiputera (Nasution, 2011). Adanya diskriminasi ini membuat kaum Bumiputra tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini diperparah oleh kebijakan awal kolonial Belanda hanya mengizinkan laki-laki dari kalangan ningrat saja yang diperbolehkan mengenyam pendidikan

(Miftakhudin, 2019: 74). Barulah pada akhir abad ke-19 mulai diluncurkan sistem pendidikan liberal yang tidak hanya bertujuan mendidik pegawai pemerintah saja, melainkan juga dari kalangan Bumiputera. Meskipun telah dibuka sekolah yang menerima siswa dari rakyat Bumiputera seperti ELS dan HBS, namun pada pelaksanaannya yang diperbolehkan bersekolah hanyalah anak-anak bangsawan Jawa saja. Untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan tertentu.

Pendidikan yang diberikan dibedakan berdasarkan tiap-tiap golongan stratifikasi sosial. Pendidikan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda lebih diutamakan bagi para golongan bangsawan dan yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Sedangkan untuk menentukan status seseorang dalam masyarakat kolonial, pemerintah Hindia Belanda berpegangan pada penghasilan dengan perhitungan tertentu maka yang berpenghasilan di atas fl. 1.200 setahun dianggap sebagai golongan yang mempunyai status yang cukup tinggi (Lestari, 2013). Bahasa pengantar di sekolah-sekolah pun masih menggunakan bahasa Belanda. Karena memang pada dasarnya pendirian sekolah tersebut ialah untuk menciptakan tokoh-tokoh yang kelak dapat bekerja untuk Belanda (Yulianti, 2018). Pendidikan yang eksklusif tersebut semakin diperparah dengan kurang dianggap pentingnya perempuan untuk mengenyam pendidikan pada masa itu. Perempuan hanya diposisikan sebagai pendamping laki-laki dan tidak terlalu penting untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang secara tidak langsung mendiskreditkan perempuan, tak luput dari perhatian Kartini. Kartini yang besar di lingkungan bangsawan dan banyak berkorespondensi dengan pemerintah kolonial Belanda, turut mengkritisi beberapa kebijakan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat, khususnya perempuan. Berikut ini adalah surat-surat Kartini yang berisi kritik terhadap kebijakan politik etis:

Tabel 2 Kategorisasi Surat Kartini Perihal Kritik Politik Etis

Tanggal	Kepada	Isi Surat
6 November 1899	Stella	Sarkasme terhadap kebijakan pemerintah tentang penggunaan bahasa belanda
1900	Ny. Ovink Soer	Sarkasme terhadap dominasi bahasa belanda yang tidak memberi ruang pada masyarakat untuk menuangkan ide

Dalam kasus ini, Kartini juga menuangkan pemikirannya terhadap penguasaan bahasa Belanda untuk membebaskan perempuan Bumiputera dari kebodohan dan keterbelakangan. Seperti tertuang pada surat tertanggal 6 November 1899 yang ditujukan kepada Stella berikut:

“...Kalau saya mampu menguasai bahasa Belanda dengan baik, kehidupan saya terjamin. Lapangan kerja yang luas akan terbentang, dan saya akan menjadi anak manusia bebas. karena sebagai orang Jawa asli, saya tau semuanya tentang dunia bumiputera”

Selain surat di atas, ada pula surat yang diberikan kepada Ny. Ovink Soer pada tahun 1900 yang berbunyi:

“...Saya hendak menekuni bahasa belanda sungguh sungguh, menguasainya. Dengan sempurna, agar saya dapat berbuat dengan bahasa itu semau saya. Dan akan mencoba

dengan pena saya menumbuhkan perhatian mereka, dapat memberi bantuan dalam usaha kami untuk memperbaiki nasib perempuan Jawa... ”

Seperti disebutkan di awal, bahwa perempuan Bumiputera akan membiarkan kebodohan dan keterbelakangan menyimpannya karena minimnya pengetahuan mereka tentang apa yang sedang mereka hadapi. Pembodohan terhadap perempuan yang dimaksudkan Kartini adalah tradisi Jawa untuk membuat wanita menjadi makhluk yang pasrah dan nrimo. Sementara itu, pengetahuan yang diberikan kepada para gadis selama dipersiapkan menjadi Raden Ayu, adalah semua hal tentang memelihara jasmani dan rohani, yang kesemuanya bertumpu pada pola citra Ningrat Jawa tentang perempuan, yakni makhluk yang berbudi bahasa halus dan berjiwa luhur (Marihandono, 2016: 172).

Pembodohan yang terjadi pada masyarakat Jawa, khususnya perempuan pada saat itu, diakibatkan oleh kesulitan akses pendidikan bagi kaum Bumiputera. Sekolah yang didirikan pada saat itu hanya dapat diakses oleh masyarakat Belanda dan beberapa masyarakat Bumiputera yang berada pada hierarki tinggi (kaum bangsawan). Kebanyakan sekolah pun menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, bukan bahasa Jawa atau Melayu. Atas dasar itulah, kaum Bumiputera terutama perempuan menjadi terbelakang. Pembodohan tersebut akan berakar pada ketidakadilan yang diterimanya (Amar, 2017).

Gencarnya Kartini menyuarakan keinginannya untuk memahami bahasa Belanda dengan baik ialah karena Ia ingin membuktikan kepada Belanda, bahwa apabila orang Jawa berpendidikan dan mampu berbahasa Belanda dengan baik, tidak ada satu alasan apapun yang dapat menghalangi Jawa berkomunikasi dengan Belanda secara layak. Oleh karena itu, bahasa Belanda merupakan kunci bagi orang Jawa untuk masuk ke dunia orang Belanda, dan sebaliknya bagi orang Jawa untuk membukakan tabir misteri dirinya agar dikenal oleh Belanda. Tanpa Jawa membuka diri, maka Jawa tetap akan menjadi sumber daya alam yang akan dihisap terus menerus oleh Belanda dan budaya Jawa akan jadi objek penelitian yang mengasyikan bagi orang Belanda tanpa perlu membaur dengan masyarakatnya.

Selain itu, hal ini juga bisa dimaknai sebagai sarkasme terhadap dominasi bahasa Belanda di Jawa. Bangsa kolonial dengan segala dominasinya, seolah menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa dengan kasta tinggi. Hal ini menjadikan masyarakat Jawa kesulitan menyuarakan aspirasinya. Dominasi bahasa Belanda ini juga termasuk dalam bentuk-bentuk kolonialisme.

C. Lunturnya Nilai-Nilai Jawa

Dalam surat-surat Kartini, terungkap pula bahwa strategi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda adalah dengan sengaja membiarkan rakyat Jawa bodoh dengan cara tidak memberi kesempatan mereka memasuki alam pikir Belanda. Hal ini juga diterapkan pada kaum bangsawan. Ketika kaum bangsawan dibiarkan bodoh, maka mereka akan lebih mudah dipengaruhi dan dieksplorasi. Diungkapkan oleh Marihandono (2016), bahwa setiap menuliskan kata “ Jawa”, yang terlintas dibenak Kartini bersaudara adalah, “*Jawa dahulu kala pernah menjadi ‘bangsa’ yang berdaulat secara sosial politik. Kini, ia sedang mengidap ‘amnesia sosial’, lupa jati diri, karena tidur yang berkepanjangan dalam penindasan selama berabad-abad*”. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Belanda dan kolonialismenya telah berhasil mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa, sehingga sistem yang dibawa oleh pemerintah Belanda, semakin mengakar pada pikiran dan

perilaku masyarakat Jawa. Beberapa surat Kartini yang mengungkapkan perihal kolonialisasi yang berakibat pada lunturnya budaya Jawa adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Kategorisasi Surat Kartini Perihal Lunturnya Nilai Jawa Akibat Kolonialisme

Tanggal	Kepada	Isi Surat
1900	Ny. Ovink Soer	Sifat gila sanjungan masyarakat Jawa
1 Agustus 1901	Ny. Abendanon	Kebiasaan mengikuti apa yang dilakukan oleh Belanda sehingga menghilangkan nilai Jawa.

Kritik Kartini pada surat tahun 1900 kepada Ny. Ovink Soer yang membahas mengenai sifat gila hormat masyarakat Jawa, bisa dikatakan juga termasuk kritik terhadap kolonial Belanda,

"...Salah satu sifat kurang baik orang Jawa, dan kalau perlu dibasmi ialah sifat gila sanjungan. Jika berhasil dibasmi, tentu hal itu akan membantu memakmurkan Jawa dan kami hanya dapat mencapainya melalui pendidikan akhlak..."

Kedatangan awal masyarakat Belanda ke Bumiputera sudah pasti membawa misi untuk mendapat pengakuan dari masyarakat Bumiputera. Sebagai kaum yang menganggap dirinya lebih tinggi dalam segala hal, Kolonial Belanda selalu ingin dihormati dan disegani oleh masyarakat Bumiputera. Hal inilah yang kemudian menular kepada masyarakat Bumiputera yang memiliki strata sosial lebih tinggi dari yang lain. Karena mereka harus menghormati kolonial Belanda, maka mereka menerapkan pula hal tersebut kepada strata dibawahnya. Salah satunya ialah kewajiban menyembah atau duduk bersimpuh kepada orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi. Mereka menganggap hal tersebut sebagai bentuk rasa hormat mereka. Hal inilah yang menjadikan Kartini memiliki pemikiran bahwa sifat gila hormat harus dirubah, agar Jawa lebih beradab.

Terdapat fenomena lain yang muncul akibat relasi kuasa pemerintah kolonial Hindia Belanda pada era Kartini, yakni penindasan dan lunturnya budaya Jawa. Seperti tertuang dalam surat Kartini tanggal 1 Agustus 1901 yang ditujukan kepada Ny. Abendanon:

" ... Wahai! Jiwa bangsaku yang asalnya seindah itu, kejayaan dan kesenian semata, kebaktian dan kerelaan belaka, apakah jadinya engkau sekarang? Dijadikan apa engkau selama berabad-abad oleh kebiasaan ikut-ikutan? Kerap kali benar dikatakan orang bahwa kami di dalam hati lebih Belanda dari pada Jawa. Pikiran yang membuat hati kami sedih!. Boleh jadi seluruh badan kami telah dijiwai pikiran dan perasaan Eropa..."

Pada surat tersebut, Kartini memang mengungkapkan kekecewaannya kepada masyarakat Jawa yang mulai hilang identitas "Jawa"-nya. Namun bila ditelisik lagi, hal tersebut bukan karna Jawa tidak menjaga adat istiadat dan budayanya sendiri, melainkan karena intervensi dan dominasi kolonial Hindia Belanda yang kemudian membuat masyarakat Bumiputera memiliki keinginan untuk memoles budayanya sendiri agar setara dengan budaya asing. Miftakhudin, (2019: 175) menuliskan bahwa salah satu bentuk nyata dari keinginan masyarakat Bumiputera untuk menunjukkan kesetaraannya dengan budaya asing ialah pakaian seragam yang dikenakan oleh prajurit kraton Yogyakarta.

Prajurit kraton yang awalnya menggunakan pakaian adat Jawa, kini memodifikasi dengan menggabungkannya dengan seragam tentara kolonial Hindia Belanda. Bila ditarik

lebih jauh, bisa saja hal tersebut merupakan strategi terselubung dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menggantikan nilai-nilai luhur dari Bumiputera dan diganti dengan nilai-nilai yang dibawa oleh pihak kolonial Hindia-Belanda (Miftakhudin, 2019). Hal tersebut ditujukan untuk menunjukkan dominasi pemerintah Hindia-Belanda terhadap Bumiputera.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kartini memiliki pemikiran kritis yang tidak hanya membahas perihal emansipasi perempuan. Lebih luas lagi, Kartini juga terhadap kebijakan kolonial di Jawa yang berimbas bagi masyarakat luas, khususnya perempuan. Kritik terhadap praktik kolonialisme di Jawa ini tertuang pada surat-surat yang dibukukan dalam buku "*Habis Gelap Terbitlah Terang*".

Adapun untuk kritiknya sendiri meliputi kritik terhadap praktik poligami dan pergundikan, kritik terhadap dominasi bahasa Belanda, serta kritik terhadap dominasi kolonial yang menghilangkan nilai-nilai keJawaan. Pada kritik perihal poligami, Kartini menilai bahwa datangnya kolonial bersamaan dengan praktik pergundikan turut memperparah sistem poligami. Pemerintah kolonial memberlakukan sistem yang membuat bangsawan Jawa hanya boleh mengakui istri yang punya darah bangsawan pula. Para bangswan juga diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Kebijakan ini diperparah dengan adanya ajaran Islam yang dibaca sebelah mata oleh masyarakat untuk membenarkan praktek poligami.

Sedangkan perihal praktik dominasi bahasa, Kartini melayangkan kritiknya karena masyarakat Jawa menjadi termarginalkan di tanahnya sendiri. Mereka tidak bisa menyuarakan apa yang mereka mau karena keterbatasan bahasa. Hal ini membuat masyarakat terjebak dalam kebodohan dan dengan mudah mengiyakan setiap kebijakan pemerintah kolonial. Salah satu aspek yang menyumbang peran besar dalam dominasi bahasa ini adalah eksklusifitas pendidikan.

Eksklusifnya pendidikan pada saat itu turut mendukung pembodohan yang terjadi di masyarakat, khususnya kaum perempuan. Intervensi pemerintah kolonial Hindia-Belanda terhadap kebijakan-kebijakan seperti poligami, politik etis dan eksklusifitas pendidikan bagi perempuan, serta efek dominasi budaya barat yang melunturkan nilai-nilai lokal, telah menyumbangkan penderitaan tersendiri yang masih terjadi hingga hari ini. Nilai-nilai Jawa masyarakat lambat laun menjadi luntur dan digantikan oleh hal-hal berbau kolonial.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa akar dari budaya patriarki tidak hanya bersumber dari adat istiadat masyarakat Jawa, melainkan juga warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada masa penjajahan. Bekas-bekas kolonialisme ini masih bisa dirasakan hingga saat ini. Banyak perempuan yang masih terkurung dalam adat istiadat bentukan kolonial dan tidak bisa melawan

F. SARAN

Dalam rangka memperluas kajian perihal pemikiran Kartini maupun kesusastraan, penulis merekomendasikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil topik serupa sebagai berikut, *pertama* penulis menyarankan agar para pemikir feminis, terutama feminisme Islam akan menelisik ranah berfikir Kartini dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian maupun gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan. Mengingat belum banyak yang mengetahui perjuangan emansipasi Kartini

yang sebenarnya sangat lekat dengan nilai-nilai Islam yang diperjuangkan oleh pemikir feminisme Islam. *Kedua*, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkomparasikan pemikiran Kartini dengan tokoh emansipasi lain di Indonesia, agar mampu memberikan warna baru dalam kajian tentang perempuan. *Ketiga*, saran ketiga yang penulis ajukan ialah, akan ada penelitian selanjutnya yang membongkar alasan kenapa Kartini dijadikan sebagai sosok emansipasi di Indonesia, dan kenapa nama Kartini lebih menonjol dibandingkan nama-nama yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. (2012). Perempuan dalam Pandangan Agama (Studi Gender dalam Perspektif Islam). MUWAZAH, Volume. 4, Nomor. 2.
- Amar. (2017). Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia pada Abad XIX. Jurnal Fajar historia Volume 1 Nomor 2,, 107-119.
- Bahardur, I. (2017). Pribumi Subaltern dalam Novel-Novel Indonesia Pascakolonial. JURNAL GRAMATIKA, Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia V3.No.1, 89- 100.
- Darma, Y. A. (2014). Analisis wacana kritis dalam multidisipliner. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fachrurrozi, M. H. (2019). Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputera. Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, Vol.2, No.1.
- Harkatiningsih, N. (2014). Pengaruh Kolonial di Nusantara. Jurnal Kalpataru- Majalah Arkeologi Vol.23 No.1.
- Hermawati, M. (2013). Tanam Paksa Sebagai Bentuk Eksploitasi. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol.1 No.1.
- Hwia, G. (2008). Analisis Wacana Kritis dan Studi Bahasa Kritis dalam Pengajaran BIPA . Mabsan Vol. 2 No. 2.
- Kartika, B. A. (2011). Eksploitasi Concubinage dan Subjek Subaltern: Hegemoni atas Perempuan Indonesia dalam Tinjauan Kritis Pascakolonial dan Feminisme Novel De Winst Karya Afifah Afra. Jurnal ATAVISME 14(1):51 10.24257/atavisme.v14i1.102.51-64, 51- 64.
- Kartini. (2010). Habis Gelap Terbitlah Terang (*door duisternis tot licht*) (diterjemahkan oleh Ari P). Jakarta: PT.Buku Seru.
- Kehoe, M. v. (2008). The Paradox of Post-Colonial Historic Preservation: Implications of Dutch Heritage Preservation in Modern Jakarta. <https://uwm.edu/wpcontent/uploads/sites/231/2016/01/2008KehoeArticle.pdf>, 1-20.
- Lestari, W. I. (2013). Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Bagi Kaum Bangsawan di Indonesia Tahun 1900-1920. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/viewFile/476/310>.
- Loomba, A. (2000). *Colonialism/ Pascacolonialism*. New York: Routledge
- Marihandono. (2016). Sisi Lain Kartini. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- McClintock, A. (1995). *Imperial Leat-her: Race, Gender, and Sexuality in the Imperial Contest*. London: Routledge.
- Miftakhudin. (2019). Kolonialisme : Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni. Sukabumi: CV.Jejak, anggota IKPI.
- Mustikawati, c. (2015). pemahaman emansipasi wanita (studi hermeniotika pemahaman emansipasi Kartini pada Buku Habis Gelap Teritlah Terang). Jurnal Kajian Komunikasi, Vol.3, No. 1, 65-70.
- Nasution. (2011). Sejarah Pendidikan Indonesia. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Noviyanti, P. (2010). Pengaruh Ide-Ide Kartini Terhadap Taraf Pendidikan Masyarakat Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Skripsi, Jurusan Sejarah, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

- Rifa'i, M. (2011). Sejarah Pendidikan Nasional "Dari Masa Klasik hingga Modern. Yogyakarta: r-ruzz Media.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* Vol. VI No.1, 13-25.
- Spivak, G. (1988). *Can The Subaltern Speak? In Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds) Marxism and the Interpretation of Culture*. London: Macmillan.
- Susilo, A. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal HISTORIA* Vol. 6, No.2,.
- Syahrudin & Susanto. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nasional Sampai Reformasi). Lampung: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Yulianti, E. S. (2018). Pendidikan Bagi Perempuan pada abad ke-19. *SEJARAH DAN BUDAYA*, Vol.12, Nomor 1.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. Sage.
<https://doi.org/10.4135/9780857028020>